Implementasi Program Banyuwangi Mengajar dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)

Alfi Haris Wanto^a * dan Arfi Ali Syahbana^a

^a Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur., Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 09 Juni 2017

Revisi pertama tanggal: 07 Agustus 2017

Diterima tanggal: 14 Agustus 2017

Tersedia online tanggal: 20 September 2017

Keywords: Program Implementations, Banyuwangi Teaching, Schools Detas

ABSTRACT

Banyuwangi teaching program is implemented on the basis that schools in areas with difficult access levels (called Detas schools), lacked of teachers, so that the learning process not able to walk properly, the problem appears because of the moratorium on civil servants. In addition, the school's operational support funds too few, so it is impossible to add auxiliary teachers at the school because of the salary is too few. Therefore, in 2014 Department of Educational Banyuwangi Regency implement Banyuwangi teaching program to overcome the problem. Implementation of Banyuwangi teaching program in Banyuwangi Regency was conducted by Banyuwangi Teaching Team (Department of Educational Banyuwangi Regency) along with assigned volunteers to Detas schools. For maximum benefits, Department of Educational Banyuwangi Regency should be provide training to volunteers in order to have the provision when commissioned and the addition of the budget so it is capable of assigning many volunteers in schools Detas in Banyuwangi Regency.

INTISARI

Program Banyuwangi mengajar ini dilaksanakan dengan dasar bahwa sekolah di daerah dengan tingkat akses sulit (Detas) kekurangan guru pengajar, sehingga proses belajar mengajar tidak bisa berjalan dengan baik, permasalahan itu timbul karena dengan adanya moratorium pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah tersebut juga sangat kecil, jadi tidak memungkinkan untuk menambah guru bantu di sekolah tersebut karena gajinya kecil. Maka dari itu pada tahun 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi melaksanakan program Banyuwangi mengajar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Implementasi program Banyuwangi mengajar di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan oleh Tim Banyuwangi mengajar (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi) beserta relawan-relawan pilihan yang ditugaskan di Sekolah Detas. Untuk memberikan manfaat yang maksimal, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi harus memberikan pelatihan kepada relawan agar mempunyai bekal saat ditugaskan dan penambahan anggaran sehingga mampu menugaskan banyak relawan di sekolah-sekolah Detas di Kabupaten Banyuwangi.

2017 FIA UB. All rights reserved.

* Corresponding author. Tel.: +62-813-3497-3102; e-mail: alfi_ub@yahoo.com

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah pilar utama bagi kemajuan suatu bangsa. Maju tidaknya suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Salah satu cara yang harus dilakukan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Mutu atau kualitas pendidikan nasional tidak dapat terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan yang layak, memadai, dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri serta peserta didik (murid) yang berkualitas.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi terus melakukan inovasi untuk pemerataan pendidikan diperkotaan maupun dipelosok pedesaan dan meminimalisir permasalahan dalam bidang pendidikan. salah satunya menjalankan suatu program yang dinamakan Banyuwangi Cerdas yang dinilai mampu mengatasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Program banyuwangi cerdas merupakan program yang sedang gencar-gencarnya pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Program ini dilatar belakangi oleh pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari Program Banyuwangi Cerdas antara lain adalah: 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi; dan 2) Memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi warganya yang berprestasi namun kurang beruntung dalam ekonomi.

Fokus penelitian disini adalah mengenai Program Banyuwangi Mengajar, Karena dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi relatif luas dan tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa desa atau dusun masuk daerah dengan tingkat akses sulit (Detas) selain itu, proses belajar mengajar di daerah tingkat akses sulit (Detas) atau pelosok pedesaan ini umumnya minim guru PNS dan juga guru honorer. Kondisi ini merupakan permasalahan pemerataan akses pendidikan. Atas dasar tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menjalankan Program Banyuwangi Mengajar yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013

Tentang Banyuwangi Mengajar dan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/3424/429.101/2013 tentang penetapan tenaga guru relawan yang bertugas di wilayah dengan tingkat akses sulit.

2. Teori

2.1 Administrasi Publik

Menurut Sjamsuddin (2006:116) yang mengemukakan pandangannya secara teoritis mengenai administrasi publik yang memiliki banyak pengembangan dan perubahan. Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses manajemen, politik, dan hukum, untuk memenuhi amanat pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagainya. Public administration diartikan sebagai sesuatu yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial menurut Henry dalam (Sjamsuddin 2006:13).

Pandangan tersebut menekankan pada pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik, karena suatu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nantinya akan berdampak positif dalam masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam, negara memerlukan kegiatan pengelolaan di semua bidang yang diawali dari pengambilan kebijakan hingga implementasi kebijakan tersebut, yang nantinya negara mampu menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/ provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/ kota, dan keputusan bupati/walikota. Menurut Thomas R Dye dalam (Wahab, 2015:14) mendefinisikan "*kebijakan publik sebagai is whatever government choose to do or not to do (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan)*". Dari definisi

Thomas R Dye ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu permasalahan publik.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik dalam arti lain bahwa usaha pemerintah dalam mengatasi problem-problem dalam masyarakat. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat mengikat dan memaksa.

2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik

Dalam perkembangannya proses kebijakan publik lebih di rampingkan atau lebih diefektifkan tetapi tidak mengubah estetika dalam proses atau tahapan dalam kebijakan publik. Menurut bukunya Hamdi (2014: 79-107) mengatakan "Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahapan atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik." Rangkaian tahapan atau proses dalam kebijakan publik dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1 Proses Pembuatan Kebijakan Publik
(Sumber: Hamdi, 2014:79)

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Setelah proses pembuatan kebijakan yang menghasilkan suatu kebijakan, selanjutnya masuk dalam tahapan kedua yaitu implementasi kebijakan. Menurut Wahab (2015:133) dalam pengertiannya Implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknis secara sinergis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

2.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa, Karena kualitas masa depan manusia sangat tergantung pada faktor pendidikan, ini berarti pendidikan haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengemban fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan saja diketahui dari mutu individu saja, tetapi juga sangat berkaitan erat dengan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2.4.1 Tujuan Pendidikan

Dalam bukunya Triwiyanto (2014:115) juga mengemukakan mengenai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan
- Menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab.

Dari penjabaran mengenai tujuan-tujuan dari pendidikan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, tujuan pendidikan yang baik yaitu mampu mengembangkan potensi dalam dirinya yang bersifat positif dan berguna bagi orang banyak dan mampu menempatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

2.4.2 Administrasi Pendidikan

Menurut Amri (2013:25) menjelaskan bahwa administrasi pendidikan itu merupakan suatu proses daur ulang penyelenggaraan pendidikan dimulai dari perencanaan, dilanjutkan oleh pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tentang usaha untuk mencapai tujuan. Menurut Aedi (2015:36-37) bahwa administrasi pendidikan memiliki tujuan agar keseluruhan pekerjaan atau kegiatan yang ada dalam suatu usaha kerja mampu berjalan dengan baik, lancar, teratur, mencapai tujuannya.

Kesimpulan bahwa administrasi pendidikan yaitu suatu proses kegiatan dalam lingkup pendidikan, yang tentunya proses tersebut nantinya akan membawa

dampak baik bagi pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan dengan baik. Tujuan administrasi pendidikan ini untuk mendayagunakan segala tenaga, fasilitas dan pendanaan secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai dari tujuan pendidikan tersebut.

2.4.3 Peningkatan Kualitas atau Mutu Pendidikan

Terdapat indikator yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menurut Buchori, M (2011, 86-87) memaparkan bahwa:

a) Prestasi Siswa Meningkat

Prestasi siswa yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran yang selama ini pendidikan berlangsung mengedepankan aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (rasa) dan psikomotorik (tingkah laku).

b) Siswa Mampu Bekerjasama

Dalam pembelajaran diperlukan suatu kerjasama antar siswa ataupun siswa dengan guru. Dengan adanya kekompakan akan timbul suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Keharmonisan perlu dijaga dan dipelihara dengan mewujudkan sikap: (1) adanya saling pengertian untuk tidak saling mendominasi, (2) adanya saling menerima untuk tidak saling berjalan menurut kemauannya sendiri, (3) adanya saling percaya untuk tidak saling mencurigai, (4) adanya saling menghargai dan (5) saling kasih sayang untuk tidak saling membenci dan iri hati.

c) Adanya Pembelajaran yang Menyenangkan

Pembelajaran yang menyenangkan sangat diperlukan untuk membantu siswa dalam menyerap dan memahami pelajaran yang diserap oleh guru, karena apabila siswa tidak menyenangi pembelajaran maka materi pelajaran tidak akan membekas pada diri siswa. Pembelajaran yang menyenangkan ini biasanya dengan menggunakan metode yang bervariasi dan pembentukan suasana kelas yang menarik.

d) Mampu berinteraksi dengan Mata Pelajaran Lain

Siswa disini dituntut untuk mampu menguasai mata pelajaran lain, tidak hanya salah satu mata pelajaran yang menonjol, tetapi pemerataan pelajaran yang lainnya.

e) Mampu Mengkontekstualkan Hasil Pembelajaran

Pembelajaran kontekstual sangat diperlukan untuk membiasakan dan melatih siswa dalam bersosial, bekerjasama dan memecahkan masalah. Belajar akan lebih bermakna apabila anak mengalami sendiri apa yang dipelajarinya bukan mengetahuinya.

f) Pembelajaran yang Efektif di Kelas dan lebih Memberdayakan Potensi Siswa

Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Secara mikro ditemukan strategi atau pendekatan pembelajaran yang efektif di kelas dan lebih memberdayakan potensi siswa.

g) Pencapaian Tujuan dan Target Kurikulum

Pencapaian tujuan dan target kurikulum merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam setiap pembelajarannya. Tujuan dan target-target tersebut bisa dijadikan tujuan minimal maupun maksimal yang harus dicapai tergantung kepada kemampuan pihak sekolah yang terdiri dari guru dan unsur-unsur lain yang melaksanakannya.

Program Banyuwangi mengajar tersebut juga sekaligus sebagai wadah mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang diamanatkan oleh para pendiri Bangsa Indonesia.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, untuk melihat secara langsung realitas yang terjadi di lapangan dalam implementasi program Banyuwangi Mengajar Kabupaten banyuwangi. Menurut Sugiyono (2008: 1): "Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah".

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan (Merille S. Grindle dalam Subarsono, 2012:93-94); karena dari model Grindle terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3.2.1 Implementasi Program Banyuwangi Mengajar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Banyuwangi

a) Isi Kebijakan

- Sasaran utama dari Program Banyuwangi Mengajar.
- Manfaat yang dihasilkan dari Program Banyuwangi Mengajar.
- Derajat Perubahan yang diinginkan dengan dijalankannya Program Banyuwangi Mengajar.
- Letak pengambilan keputusan dalam Program Banyuwangi Mengajar.
- Pelaksanaan Program Banyuwangi Mengajar.

- Sumberdaya yang dilibatkan dalam Program Banyuwangi Mengajar.
- b) Konteks Implementasi
 - Strategi aktor yang terlibat dalam Implementasi Program Banyuwangi Mengajar.
 - Karakteristik lembaga dalam menjalankan Program Banyuwangi Mengajar.
 - Tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana
- c) Dampak yang dihasilkan program Banyuwangi mengajar
 - Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok setelah diimplementasikan program Banyuwangi mengajar
 - Perubahan dan penerimaan masyarakat setelah diimplementasikan program Banyuwangi mengajar.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi yang diteliti adalah ruang atau tempat dimana penelitian dilaksanakan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan situs penelitian ini dilakukan di Sekolah dengan tingkat akses sulit (Detas), yaitu:

- a) SDN 6 Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
- b) SDN 4 Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi; dan
- c) SMPN 2 Satu Atap, Kecamatan Licin, Kabupaten Pesanggaran.

Situs Penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Jl. KH. Agus Salim No. 5, Banyuwangi, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

- a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
- b) Bidang Keuangan, karena yang mengetahui secara teknis Program Banyuwangi Mengajar.
- c) Bidang Kepegawaian, karena proses penempatan relawan tenaga pengajar dilakukan pada bidang ini,
- d) Bidang Penyusunan Program, karena memiliki peran penting dalam program Banyuwangi mengajar.

3.4 Sumber Data

- a) Informan
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi,
 - Kepala Sub Bagian Keuangan,
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - Serta relawan yang ditugaskan pada daerah dengan tingkat akses sulit (DETAS) di Kabupaten Banyuwangi,
 - Kepala Sekolah di daerah Detas.

b) Peristiwa

Dengan mengamati peristiwa atau aktivitas tersebut peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang diteliti. Penelitian ini peristiwa bisa peneliti ambil mulai dari proses pemilihan relawan Banyuwangi Mengajar, lalu penempatan relawan, sampai relawan tersebut mengajar di wilayah Detas tersebut.

c) Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis, dokumen serta arsip yang tertulis dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Dokumen ini berkaitan dengan fokus penelitian yang didapat di Bidang Keuangan dan Bidang Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Dokumen-dokumen yang dipakai seperti, data relawan, SK tentang program Banyuwangi Mengajar, dan dokumen-dokumen terkait program tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik dan peneliti ingin mengetahui secara mendalam melalui responden yang ditanya (Sugiyono, 2008:72). Wawancara ini menggunakan wawancara semistruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya dan ide-idenya tentang Implementasi Program Banyuwangi Mengajar tersebut.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati peristiwa di lapangan. Peneliti menggunakan jenis observasi tak berstruktur dengan alasan agar peneliti dapat melakukan penelitian secara bebas, mencatat apa yang menarik, menganalisis kemudian menyimpulkan. Observasi diperoleh dengan melihat sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian Program Banyuwangi Mengajar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

3.5.3 Dokumentasi

Pengumpulan data dengan memperoleh dokumen atau arsip dari instansi yang menjadi obyek penelitian. Data yang diperoleh adalah data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang termasuk juga data yang berasal dari Internet, brosur, peraturan-peraturan, dan sejenisnya yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian yaitu mengenai sejauh mana Implementasi

Program Banyuwangi Mengajar di Kabupaten Banyuwangi.

3.6 Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti merupakan kegiatan untuk melakukan pengukuran maka harus terdapat alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasa disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan:

- a) Peneliti Sendiri
- b) Pedoman wawancara
- c) Perangkat Penunjang

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan metode interaktif. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14):

Gambar 2 Model Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana

(Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 14))

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Sasaran Utama dari Program Banyuwangi Mengajar

Sasaran inti dari program ini yaitu sekolah di daerah Detas, dengan adanya program Banyuwangi mengajar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi tentunya membawa dampak yang baik terhadap kelangsungan proses belajar mengajar di daerah dengan tingkat akses sulit tersebut karena ketika sekolah tersebut kekurangan tenaga pengajar proses kegiatan belajar tidak akan

berjalan dengan efektif, tetapi setelah di tempatkan relawan tenaga pengajar di sekolah tersebut sangat membantu dan mampu mengurangi permasalahan kekurangan tenaga pengajar di daerah dengan tingkat akses sulit (Detas) di Kabupaten Banyuwangi.

4.1.2 Manfaat yang Diharapkan

Manfaat yang dihasilkan untuk aktor pelaksana yaitu program ini sering diikuti sertakan dalam perlombaan inovasi daerah tingkat nasional dan mampu menarik daerah lain untuk mempelajari program-program mengenai pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya program ini menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi perubahan sangat besar karena menurut angka di atas peningkatan kualitas pendidikan di Banyuwangi sangat baik dilihat dari aspek peningkatan nilai di atas, selain itu manfaat program tersebut mengurangi jumlah anak yang putus sekolah karena beberapa faktor. Hal ini karena relawan yang diterjunkan di sekolah detas tersebut mengurangi permasalahan kekurangan tenaga pengajar di daerah detas dan relawan tersebut berperan aktif berinovasi dalam mengajar siswa-siswi di sekolah tersebut. tetapi disisi lain ada permasalahan baru yang muncul diruang lingkup relawan yang ditugaskan di sekolah-sekolah daerah Detas, permasalahan tersebut hanya sebagian kecil dari relawan tersebut yang belum mempunyai kemampuan untuk mengajar dan tetap harus mengabdikan diri selama 1 tahun. Semangat para relawan Banyuwangi mengajar ini yang terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

4.1.3 Derajat Perubahan

Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya program ini yaitu merubah pola berfikir masyarakat di daerah terpencil yang semula berfikir bahwa lebih penting membantu orang tua mencari uang dan menikahkan anaknya diusia yang sangat dini. Pola berfikir seperti itu perlahan mulai diubah dengan adanya program ini. Relawan yang ditempatkan di daerah detas tersebut mempunyai tugas yang sangat berat, selain mengajar dengan pembelajaran yang inovatif di sekolah-sekolah di daerah detas tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitar karena setiap relawan yang ditugaskan pasti menempati rumah warga di daerah tersebut. Dengan bekal yang peroleh dari perguruan tinggi serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, relawan tersebut dituntut untuk berperan aktif dalam masyarakat untuk merubah pola berfikir masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Faktor pendukung yang lain untuk menciptakan derajat perubahan yang diinginkan yaitu penyediaan

fasilitas sekolah agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Banyuwangi cukup tinggi, sedangkan angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang tingkatan SD masih cukup tinggi anak yang tidak dalam usia sekolah tetapi bersekolah pada jenjang tersebut dengan angka 5,90%, sedangkan angka partisipasi murni (APM) pada tingkatan SD dan SMP cukup tinggi anak yang memanfaatkan fasilitas sekolah, sedangkan pada tingkat SMA masih cukup rendah dengan angka 58,63%.

4.1.4 Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan bersifat terpusat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi karena dengan melihat aktor-aktor yang terlibat dalam Implementasi Program Banyuwangi Mengajar, bahwa Kepala Dinas sebagai penanggung jawab program ini dan secara teknis anggaran yang dipegang kendalinya oleh Bidang Keuangan, teknis pemilihan dan penempatan relawan dipegang kendalinya oleh bidang Umum dan kepegawaian, dan kedua bidang tersebut secara rutin selalu memberikan pembinaan kepada relawan setiap 6 bulan sekali ditempat yang telah disediakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

4.1.5 Pelaksana Program

Pihak yang terlibat dalam pelaksana program Banyuwangi Mengajar guna mencapai kesuksesan program terfokus di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Kepala Dinas yang memberikan kepercayaan kepada anggota atau timnya Sub bagian Penyusunan Program, Sub bagian Keuangan, Sub bagian Umum dan Kepegawaian, tentunya dibantu oleh warga sekolah daerah detas dan para relawan yang ditugaskan di daerah tersebut yang secara berkesinambungan mempunyai tugas masing-masing untuk memberikan output yang baik terhadap Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Dapat dilihat tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Jabatan dan Kewenangan Pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

NO	NAMA	JABATAN	KEWENANGAN
1	Drs. Sulihitoyo, S.Pd, MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Program Banyuwangi Mengajar
2	Hj. Sumiyati, S.Sos Anggota: a. Yuliatius Alfiah, S.Pd b. I Gusti Winata, S.Pd	KASUBBAG Penyusunan Program dan Staf	Menganalisis permasalahan pendidikan dan membuat program inovasi
3	Dra. Nuriyatus S. M.Pd Anggota: a. Rohadin, S.Pd	KASUBBAG Keuangan dan Staf	Teknis Penganggaran dan Pembinaan Program Banyuwangi Mengajar
4	H. Muhlis S.Pd, MM Anggota: a. Suharti, S.Pd	KASUBBAG Umum Kepegawaian dan Staf	Teknis Penempatan Relawan dan Pembinaan Program Banyuwangi Mengajar

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2017

4.1.6 Sumber Daya

Sumber daya yang mendukung program ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

a) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran ini secara kreatif diusahakan untuk mendukung program Banyuwangi mengajar. Sumber daya anggaran ini sepenuhnya bersumber dari dana APBD dengan jumlah yang bervariasi yang setiap tahunnya selalu meningkat untuk anggaran program Banyuwangi mengajar. Dana anggaran tersebut sepenuhnya dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi terutama yang berwenang dalam mengelolanya adalah Sub bagian Keuangan. Dana tersebut dikelola untuk mendukung implementasi program Banyuwangi mengajar dengan cara membayar honor relawan dan melakukan pembinaan kepada relawan tersebut.

b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang terlibat dalam program Banyuwangi mengajar ini adalah pelaksana program dan relawan Banyuwangi mengajar.

4.1.7 Strategi Aktor Yang Terlibat

Strateginya yang digunakan dengan Surat Keputusan atau SK Kepala Dinas dengan membentuk tim Banyuwangi mengajar yang terdiri dari Sub bagian penyusunan program, Sub bagian umum dan kepegawaian, dan Sub bagian keuangan yang sangat berperan dalam implementasi program ini. selanjutnya strateginya dengan memberikan pembinaan kepada relawan yang ditugaskan, dalam pembinaan tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memberikan pembekalan dan memotivasi para relawan untuk dapat berinovasi dalam mengajar di sekolah detas. Selain itu strategi yang digunakan aktor pelaksana yaitu dengan menempatkan relawan tersebut ke daerah detas yang jauh dari tempat tinggal asalnya, agar relawan tersebut menempati rumah warga sekitar yang telah disediakan dan mampu berbaur dengan masyarakat sekitar.

4.1.8 Karakteristik Lembaga

Karakteristik Dinas Pendidikan Kabupaten dalam menjalankan tugas mengutamakan kebersamaan atau kekompakan dalam setiap bidang. Saling membantu bidang satu dengan bidang yang lain dalam menjalankan suatu program. Dalam hal ini program Banyuwangi mengajar setiap bidang yang berada dalam tim Banyuwangi mengajar saling membantu satu sama lain, sehingga pelaksanaan program tersebut dapat dijalankan dengan baik. intinya adalah ingin memberikan

pelayanan pendidikan yang prima dan bermutu kepada masyarakat.

4.1.9 Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari aktor pelaksana cukup baik, dengan dibuktikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama di daerah detas juga cukup baik. Konsistensi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Banyuwangi mengajar ini juga sangat tinggi dan hasilnya adalah program Banyuwangi mengajar ini terus dijalankan mulai Tahun 2014 sampai saat ini dan memberikan manfaat yang besar bagi pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sasaran Utama

Sasaran utama dari program Banyuwangi mengajar adalah sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan tingkat akses sulit (Detas), karena keseluruhan sekolah yang berada di daerah tersebut kualitasnya sangat buruk karena kekurangannya tenaga pengajar di sekolah tersebut sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Dengan adanya program Banyuwangi mengajar ini dinilai mampu mengatasi permasalahan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah detas tersebut.

4.2.2 Manfaat Yang Dihasilkan

Manfaat yang diharapkan adalah pemerataan fasilitas penunjang pendidikan khususnya tenaga pengajar di daerah detas maupun perkotaan harus sama, dengan adanya permasalahan kekurangan tenaga pengajar di daerah detas tersebut mampu di atasi oleh program Banyuwangi mengajar. Sekolah-sekolah di daerah detas dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik karena jumlah tenaga pengajar tercukupi. Dengan adanya program ini juga sekolah-sekolah di daerah detas tidak direlokasi ke daerah yang ramai penduduk sehingga akses pendidikan di daerah detas tersebut tetap mudah dan dekat dengan pemukiman penduduk di daerah detas, dampaknya yaitu masyarakat sekitar lebih tenang menitipkan anaknya ke sekolah dan berkurangnya anak putus sekolah di daerah tersebut.

Manfaat yang dirasakan oleh aktor pembantu dalam program ini relawan Banyuwangi mengajar yaitu bertambahnya pengalaman dengan ditempatkan di daerah detas tersebut, memanfaatkan ilmunya sebagai bekal ditempatkan di daerah detas, selalu berinovasi dalam mengajar sehingga pelajaran mudah diserap siswa-siswi dan meningkatkan nilai siswa-siswi tersebut. Sebagian permasalahan yang timbul ialah jurusan yang didapat dalam perguruan tinggi tidak

sesuai ketika untuk mengajar siswa siswi di sekolah detas. Dengan semangat tinggi para relawan tersebut terus belajar untuk memberikan yang terbaik bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

4.2.3 Derajat Perubahan

Derajat perubahan yang diinginkan dengan diimplementasikannya program Banyuwangi mengajar ini dengan ditempatkannya relawan-relawan pilihan di sekolah detas tersebut harus mampu membawa perubahan terhadap sekolah dan lingkup masyarakat, dilingkup sekolah yaitu memberikan pembelajaran secara inovasi sehingga pelajaran yang diberikan mudah untuk diserap siswa-siswi di sekolah tersebut, sedangkan perubahan yang dilakukan dalam lingkup masyarakat ialah merubah atau membenahi pola berfikir masyarakat sekitar yang semula menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting harus diubah bahwa pendidikan itu sangat penting, karena dengan pendidikan daerah detas tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran dan daerah tersebut mudah berkembang. Selain itu tingkat perubahan di sekolah detas tersebut dengan penyediaan fasilitas penunjang pendidikan untuk menarik minat belajar siswa-siswi daerah tersebut, hasilnya adalah APS sangat tinggi di Kabupaten Banyuwangi.

4.2.4 Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan disini hanya terpusat di Dinas Pendidikan saja, yaitu Kepala Dinas dengan dibantu Tim Program Banyuwangi mengajar. Tim tersebut KASUBBAG Penyusunan Program bersama staf yang membantu menganalisis masalah-masalah pendidikan yang selanjutnya dibuatkan suatu solusi dalam bentuk program dengan rekomendasi dari Kepala Dinas. Dalam tim tersebut ada KASUBBAG Keuangan bersama stafnya yang secara teknis mengatur tentang anggaran pengeluaran program Banyuwangi mengajar tersebut. selanjutnya ada KASUBBAG Umum dan Kepegawaian bersama stafnya yang mengatur secara teknis penempatan relawan-relawan tersebut di sekolah Detas.

Setiap bagian dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mempunyai porsinya sendiri dalam melakukan tugasnya dalam program ini. Dukungan para relawan yang dilibatkan dalam program Banyuwangi mengajar ini dan bersedia ditempatkan di daerah Detas tersebut. Tentunya para pengambil keputusan disini juga memberikan pengawasan dan pembinaan kepada relawan yang ditempatkan di sekolah detas selama 3 sampai 4 bulan sekali. Pembinaan tersebut untuk memberikan bekal dan memotivasi relawan agar para relawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

4.2.5 Pelaksana Program Banyuwangi Mengajar

Pelaksanaan program Banyuwangi mengajar semua pelaksana dianggap sudah kompeten dan kapabel dilihat dari angka-angka yang menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi cukup baik. Hasil peningkatan pendidikan tersebut tidak terlepas dari upaya para relawan yang ditugaskan di daerah detas, karena relawan tersebut merupakan orang-orang pilihan yang mendapatkan beasiswa masuk diperguruan tinggi dan setelah menyelesaikan studinya ditugaskan menjadi relawan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah detas tersebut.

4.2.6 Sumber Daya Program Banyuwangi Mengajar

Sumber daya yang mendukung implementasi program Banyuwangi mengajar ada 2, yaitu Sumber daya manusia dan Sumber daya anggaran. Sumber daya manusia dalam hal ini yaitu aktor pelaksana program Banyuwangi mengajar dan keseluruhan relawan yang ditugaskan di sekolah detas. Sedangkan Sumber daya anggaran yang sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi yang dikelola oleh Sub bagian keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan program Banyuwangi mengajar. Sumber daya anggaran maupun Sumber daya manusia masih belum bisa memberikan manfaat bagi keseluruhan sekolah di daerah detas, karena jumlah anggaran yang terbatas.

4.2.7 Strategi Aktor Yang Terlibat

Program Banyuwangi mengajar ini diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru di sekolah-sekolah detas. Strateginya yang digunakan dengan SK Kepala Dinas dengan membentuk tim Banyuwangi mengajar yang terdiri dari Sub bagian penyusunan program, Sub bagian umum dan kepegawaian, dan Sub bagian keuangan yang sangat berperan dalam implementasi program ini. Strategi selanjutnya yaitu dengan memberikan pembinaan kepada relawan semata-mata untuk memotivasi para relawan, dan dalam penempatan relawan di sekolah detas, penempatan relawan tersebut ke daerah detas yang jauh dari tempat tinggal asalnya, agar relawan tersebut menempati rumah warga sekitar yang telah disediakan dan mampu berbaur dengan masyarakat sekitar.

4.2.8 Karakteristik Lembaga

Karakteristik Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memegang teguh kekompakan dan konsistensi dalam menjalankan setiap program yang diimplementasikan. Karena yang dihasilkan dari program tersebut berbeda apabila aktor pelaksananya

bersifat individualis atau berjalan sendiri-sendiri. Melalui program Banyuwangi mengajar Dinas Pendidikan bersama tim pelaksana program juga saling gotong-royong satu dengan yang lainnya, karena agar program tersebut dapat diimplementasikan sesuai agenda dan menghasilkan manfaat yang besar bagi pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Dengan kekompakan dan konsistensi para aktor pelaksana program, hasilnya program Banyuwangi mengajar tetap berjalan dengan baik sampai saat ini.

4.2.9 Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari aktor pelaksana cukup baik, dengan dibuktikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama di daerah detas juga cukup baik. Konsistensi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Banyuwangi mengajar ini juga sangat tinggi dan hasilnya adalah program Banyuwangi mengajar ini terus dijalankan sampai saat ini dan memberikan manfaat yang besar bagi pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

5. Kesimpulan

Sasaran utama dari program Banyuwangi mengajar adalah sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan tingkat akses sulit (Detas), karena keseluruhan sekolah yang berada di daerah tersebut kualitasnya sangat buruk karena kekurangannya tenaga pengajar di sekolah tersebut sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. begitupun Manfaat yang diharapkan adalah dengan adanya permasalahan kekurangan tenaga pengajar di daerah detas tersebut mampu di atasi oleh program Banyuwangi mengajar. Sekolah-sekolah di daerah detas dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik karena jumlah tenaga pengajar tercukupi. Sebagian permasalahan yang timbul ialah jurusan yang didapat dalam perguruan tinggi tidak sesuai ketika untuk mengajar siswa siswi di sekolah detas.

Perubahan terhadap sekolah dan lingkup masyarakat, di lingkup sekolah yaitu memberikan pembelajaran secara inovatif sehingga pelajaran yang diberikan mudah untuk diserap siswa-siswi di sekolah tersebut, sedangkan perubahan yang dilakukan dalam lingkup masyarakat ialah merubah atau membenahi pola berfikir masyarakat sekitar yang semula menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting.

Letak pengambilan keputusan dalam program Banyuwangi mengajar ini terpusat di Dinas Pendidikan saja. Kepala Dinas sebagai penanggung jawab program tersebut dan dibantu Tim Banyuwangi Mengajar ada Kasubag Subagian Penyusunan Program, Subagian Kepegawaian, dan Subagian Keuangan serta keseluruhan relwan yang ditugaskan di sekolah

detas. Pelaksana program Banyuwangi mengajar dianggap sudah kompeten dan kapabel dilihat dari angka-angka yang menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan. Sumberdaya manusia dalam hal ini yaitu aktor pelaksana program Banyuwangi mengajar dan keseluruhan relawan yang ditugaskan di sekolah detas. Sedangkan sumberdaya anggaran yang sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi

Strateginya yang digunakan dengan SK Kepala Dinas dengan membentuk tim Banyuwangi mengajar yang terdiri dari Subagian penyusunan program, Subagian umum dan kepegawaian, dan Subagian keuangan yang sangat berperan dalam implementasi program ini. Karakteristik Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memegang teguh kekompakan dan konsistensi. Konsistensi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Banyuwangi mengajar ini juga sangat tinggi dan hasilnya adalah program Banyuwangi mengajar ini terus dijalankan sampai saat ini dan memberikan manfaat yang besar bagi pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

Daftar Pustaka

- Aedi, N. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amri, S. 2013. *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar & Menengah: dalam Teori, Konsep dan Analisis*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Arikunto. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Buchori, M. 2011. *Guru Profesional dan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Uhamka Press
- Domai, T. 2011. *Desentralisasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipatif*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Indradi, S. 2006. *Dasar-dasar dan teori administrasi publik*. Malang: Agritek YPN
- Islamy, I. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Penerbit PMN
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications
- Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: cv. Alfabeta
- .2008. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: cv. Alfabeta
- Sukardi. 2014. *Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafaruddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo
- Triwijayanto, T. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wahab, S. A. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta: Percetakan SIC
- .2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- .2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo Yogyakarta.
- Banyuwangi. 2017. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (online)
- www.banyuwangikab.go.id Diakses tanggal 4 Januari 2017
- Badan Pusat Statistik. 2017. Website Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (online)
- <https://banyuwangikab.bps.go.id/> Diakses tanggal 4 Januari 2017
- Dinas Pendidikan. Website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. (online)
- www.pendidikan.banyuwangikab.go.id Diakses tanggal 4 Januari 2017
- Galih, B. 2015. *Puan Maharani: Wajib Belajar 12 Tahun Dimulai Juni 2015*. (Online)
- <http://edukasi.kompas.com/read/2015/01/13/01183401/Puan.Maharani.Wajib.Belajar.12.Tahun.Di.mulai.Juni.2015> Diakses tanggal 2 November 2016
- Kompas. 2015. Kekurangan Guru Jadi Kendala Terbesar Pendidikan di Pedalaman. (online)
- <http://print.kompas.com/baca/dikbud/pendidikan/2015/11/23/Kekurangan-Guru-Jadi-Kendala-Terbesar-Pendidikan-d> Diakses tanggal 2 November 2016
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Pdf)
- UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Pdf)
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional. (Pdf)
- PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Pdf)
- Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas. (Pdf)
- Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Banyuwangi Mengajar. (Pdf)

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2011
Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (Pdf)